

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

¹Ruilin Tari Misnar, ²Maria Maria, ³Yuli Antina Aryani

^{1, 2, 3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia.

¹ ruilintari2001@gmail.com

² mariamardjuki@polsri.ac.id

³ yuli_aa@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to identify the impact of economic growth, government size and capital expenditure on the weaknesses of the internal control system in district/city governments in South Sumatra. This study used quantitative methods with data collection from secondary documents. The study population includes 17 district/city governments in South Sumatra for 5 years from 2017-2021, with a total of 85 observation units. Data analysis was performed using panel data regression using the Eviews 12 application. The results showed that overall, there was an influence of 10.23%. Partially, government size and capital expenditure have a significant influence on the weakness of the SPI. However, economic growth does not affect the weakness of SPI.

Keywords: *Economic Growth; Government Size; Capital Expenditure and Internal Control System Weaknesses.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, dan belanja modal terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi penelitian mencakup 17 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama 5 tahun, dari 2017-2021, dengan total 85 unit pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel menggunakan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, terdapat pengaruh sebesar 10,23%. Secara parsial pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan SPI.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Ukuran Pemerintah; Belanja Modal, dan Kelemahan SPI.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 pasal 56 ayat 4 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan keuangan harus didukung oleh sistem pengendalian yang baik dan memadai. PP No.60 Tahun 2008 mengadopsi Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*. SPI adalah suatu proses integral dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pada pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada pernyataan No.3 menyatakan bahwa LHP yang diterbitkan oleh BPK, wajib memuat laporan tentang pengendalian intern sehubungan dengan kelemahan dalam penerapan pengendalian intern atas LK yang dikira selaku “keadaan yang bisa dilaporkan” serta perihal tersebut wajib diinformasikan secara tertulis kepada entitas yang diperiksa.

Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS) tahun 2022 yang dipublikasikan oleh BPK RI, hasil pemeriksaan BPK terhadap 541 LKPD mengungkapkan, 7.020 (44,8%) permasalahan kelemahan SPI. Kelemahan ini terdiri dari 1.188 permasalahan SPI pemerintah pusat, 5.366 permasalahan kelemahan SPI pemerintah daerah dan 466 permasalahan kelemahan BUMN & Badan Lainnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun 2017-2021, ditemukan beragam kelemahan dalam SPI pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, jumlah kelemahan SPI mengalami fluktuasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan optimal serius dalam mengatasi kelemahan SPI yang ditemukan. Padahal, SPI merupakan hal yang penting dalam menggambarkan keandalan pelaporan keuangan, aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam suatu organisasi dapat menyebabkan perubahan, terutama dalam aspek ekonomi, yang secara otomatis akan meningkatkan aktivitas komersial di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi ini juga berpotensi menyebabkan peningkatan risiko kecurangan. Perubahan-perubahan yang beragam ini menuntut penyesuaian dari SPI. Hasil temuan yang dilakukan oleh Samhah (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI. Di sisi lain, temuan yang dilakukan oleh Andesti (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI.

Ukuran pemerintah dapat diproyeksikan dari total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Aset adalah sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya terhadap masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terdapatnya tindak kecurangan karena pemerintah daerah yang mempunyai total aset yang besar cenderung memiliki potensi lahan basah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017) menemukan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Andesti (2022) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu ukuran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan SPI.

Belanja modal mencakup semua pengeluaran negara yang ditujukan untuk pembentukan aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta bentuk fisik lainnya. Pengadaan suatu barang fisik yang dilakukan pemerintah daerah dapat mengakibatkan terjadinya praktik korupsi pada proses pengadaan tersebut. Temuan dari penelitian Yuni (2016) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Namun, hasil penelitian Tuti (2020) menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi data LKPD kabupaten/kota di Sumatera Selatan dan BPS. Data diolah menggunakan software Eviews 12. Penelitian dilakukan pada 17 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode tahun 2017 hingga 2021, dengan unit pengamatan sebanyak 85. Berikut adalah variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	$\frac{PDRB\ t1 - PDRB\ t0}{PDRB\ t0} \times 100\%$
Ukuran Pemerintah (X ₂)	Total Aset
Belanja Modal (X ₃)	Total belanja modal
Kelemahan SPI (Y)	Jumlah temuan audit

Sumber: Berbagai referensi (2023).

Adapun variabel independen adalah Pertumbuhan Ekonomi (X₁), Ukuran Pemerintah (X₂), dan Belanja Modal (X₃), sedangkan Kelemahan SPI (Y) sebagai variabel dependen. Pengujian asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta regresi data panel, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Dalam analisis data panel dengan menggunakan EViews 12, terdapat tiga jenis estimasi model regresi yang digunakan, yaitu: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model estimasi mana yang tepat, dilakukan uji chow, uji hausman, uji leargrange multiplier. Estimasi model terbaik dipilih berdasarkan hasil uji yang menunjukkan pemilihan model yang sama minimal 2 kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode estimasi regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: CEM, FEM dan REM dengan menggunakan teknik variabel *dummy*. Berikut pemilihan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel dengan beberapa pengujian yang dapat dilakukan.

Uji Chow

Uji *chow* merupakan pengujian untuk menentukan *Fixed Effect* atau *Common Effect* (Basuki & Prawoto, 2016). Hipotesis yang dibentuk dalam uji *chow* adalah sebagai berikut: H₀: *Common Effect Model*; H₁: *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis adalah membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *chi-square*, dengan ketentuan: H₀: Jika *chi-square* > 0,05; H₁: Jika *chi-square* < 0,05 dan hasil uji ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.636514	(16,65)	0.0841
Cross-section Chi-square	28.772043	16	0.0255

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Berdasarkan uji chow dari nilai Cross-section Chi-square yaitu sebesar 28,772043 dengan probabilitas 0,0255 < 0,05 maka H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik ialah FEM dari pada CEM.

Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian untuk menentukan *Fixed Effect* atau *Random Effect* (Basuki & Prawoto, 2016). Hipotesis yang dibentuk dalam uji hausman adalah sebagai berikut: H₀: *Random Effect Model*; H₁: *Fixed Effect Model*.

Dasar penolakan terhadap hipotesis adalah membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *chi-square*, dengan ketentuan sebagai berikut: H_0 : Jika *chi-square* > 0,05; H_1 : Jika *chi-square* < 0,05. Hasil uji hausmen dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hausmen

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.265135	3	0.2342

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Berdasarkan uji hausmen dari nilai Cross-section Chi-square yaitu sebesar 4,265135 dengan probabilitas $0,02342 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik ialah REM dari pada FEM.

Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier merupakan pengujian untuk menentukan *Common Effect* atau *Random Effect* (Basuki & Prawoto, 2017). Hipotesis yang dibentuk dalam uji *lagrange multiplier* adalah H_0 : *Common Effect Model*; H_1 : *Random Effect Model*.

Dasar penolakan terhadap hipotesis adalah membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *Cross-section Breusch-Pagan* dengan ketentuan sebagai berikut: H_0 : Jika *chi-square* > 0,05; H_1 : Jika *chi-square* < 0,05. Hasil uji lagrange multiplier dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.912932 (0.3393)	2.082437 (0.1490)	2.995369 (0.0835)
Honda	0.955475 (0.1697)	-1.443065 (0.9255)	-0.344778 (0.6349)
King-Wu	0.955475 (0.1697)	-1.443065 (0.9255)	-0.863415 (0.8060)
Standardized Honda	1.389694 (0.0823)	-1.099426 (0.8642)	-3.724405 (0.9999)
Standardized King-Wu	1.389694 (0.0823)	-1.099426 (0.8642)	-3.890716 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.912932 (0.3280)

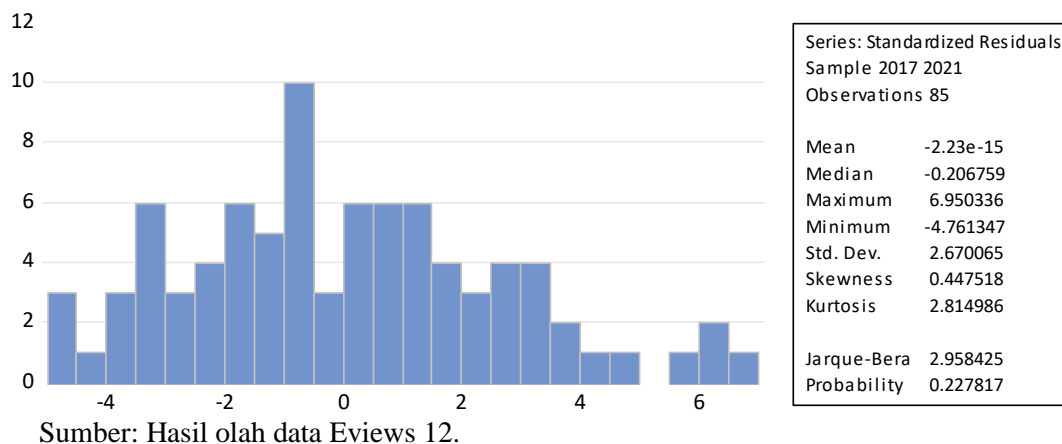
Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Hasil uji lagrange multiplier dari nilai *Cross-section Breusch-Pagan* sebesar $0,3393 > 0,05$ maka H_1 diterima yang berarti model terbaik adalah REM dari pada CEM.

Uji Asumsi Klasik

Dalam model regresi linier berganda, terdapat empat pengujian asumsi klasik yang perlu dilakukan, yaitu: Uji normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji mutlakolinieritas (Basuki & Prawoto, 2016). Hasil uji masing-masing asumsi klasik dapat dilihat pada gambar 1, tabel 5, dan tabel 6.

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas.

Gambar 1 menunjukkan data berdistribusi normal. Berdasarkan nilai probabilitas sebesar $0,227817 > 0,05$ maka H_0 diterima.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.001568	0.083221
X2	-0.001568	1.000000	0.780312
X3	0.083221	0.780312	1.000000

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Tabel 6 mendeskripsikan data tidak mengalami permasalahan multikolinearitas. Berdasarkan nilai correlation setiap variabel $> 0,90$, sebagai berikut:

1. Nilai *correlation* antara X_1 dan X_2 sebesar $-0,001 < 0,90$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas.
2. Nilai *correlation* antara X_1 dan X_3 sebesar $0,083 < 0,90$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas..
3. Nilai *correlation* antara X_2 dan X_3 sebesar $0,780 < 0,90$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.754648	0.447047	3.924975	0.0002
X1	0.099632	0.079067	1.260100	0.2113
X2	5.95E-14	8.12E-14	0.732771	0.4658
X3	-5.50E-13	1.19E-12	-0.461140	0.6459

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Berdasarkan tabel 7 data tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada nilai probabilitas setiap variabel $> 0,05$.

Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.635686	0.835696	9.136922	0.0000
X1	0.258103	0.132669	1.945470	0.0552
X2	3.38E-13	1.57E-13	2.148755	0.0346
X3	-5.82E-12	2.21E-12	-2.635000	0.0101

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Berdasarkan tabel 7 dapat dibuat model persamaan:

$$Y = 7.63 + 0.25X1 + 3.38X2 - 5.82X3 + e$$

Dari model persamaan di atas, konstanta (a) = 7,63 menunjukkan nilai konstan; artinya apabila nilai variabel pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, dan belanja modal nilainya 0, maka kelemahan SPI daerah sebesar 7,63 atau 7,63%. Koefesien regresi $X_1 = 0,025$ nilai positif menunjukkan adanya hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel kelemahan SPI. Jika nilai variabel pertumbuhan ekonomi naik 1, kelemahan SPI akan naik sebesar 0,025%. $X_2 = 3,38$ nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ukuran pemerintah dengan variabel kelemahan SPI. Jika nilai variabel ukuran pemerintah naik 1, kelemahan SPI akan naik sebesar 3,38%. $X_3 = -5,82$ nilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel belanja modal dengan variabel kelemahan SPI. Jika nilai variabel belanja modal naik 1, nilai kelemahan SPI akan turun sebesar 5,82%.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.102323
Adjusted R-squared	0.069076
S.E. of regression	2.579180
F-statistic	3.077638
Prob(F-statistic)	0.032119

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Tabel 8 menggambarkan nilai korelasi antara variabel dependen dan variabel independen adalah 0,1023, yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, dan belanja modal adalah 10,23%. Sementara itu, sebesar 89,77% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan tidak dijelaskan.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Paramater Individual (Uji T)

Tabel 9. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.635686	0.835696	9.136922	0.0000
X1	0.258103	0.132669	1.945470	0.0552
X2	3.38E-13	1.57E-13	2.148755	0.0346
X3	-5.82E-12	2.21E-12	-2.635000	0.0101

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Tabel 9 menggambarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pertumbuhan ekonomi (1,94) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (1,66). Dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,05 \leq 0,5$), maka H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan SPI.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pertumbuhan ekonomi (2,14) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (1,66). Dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,03 < 0,50$), maka H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan SPI.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} belanja modal (-2,63) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (1,66). Dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,01 < 0,50$), maka H_3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kelemahan SPI.

Uji Signifikan Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji F)

Tabel 10 Hasil Uji F

R-squared	0.102323
Adjusted R-squared	0.069076
S.E. of regression	2.579180
F-statistic	3.077638
Prob(F-statistic)	0.032119

Sumber: Hasil olah data Eviews 12.

Dari hasil uji F dengan nilai probabilitas (F-statistic), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,077, sementara nilai F_{tabel} sebesar 2,330. Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($3,077 > 2,330$). Dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ($0,032 < 0,05$), H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan SPI.

Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien menunjukkan nilai positif signifikan terhadap kelemahan SPI, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,94 > 1,66$). Probabilitas tingkat signifikansi pertumbuhan ekonomi ($0,05 \leq 0,05$). Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI (H_1 diterima). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi temuan kelemahan SPI.

Hasil penelitian ini didukung oleh Andesti (2020) yang dalam penelitiannya menemukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelemahan SPI. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, diikuti dengan peningkatan kasus kelemahan SPI pada suatu daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan masalah keagenan seperti self interest akan meningkat saat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menyebabkan kelemahan SPI menjadi meningkat.

Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien menunjukkan nilai positif dan signifikan terhadap kelemahan SPI, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,14 > 1,66$). Probabilitas tingkat signifikansi ukuran pemerintah daerah sebesar 0,03 sedangkan nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,03 < 0,05$). Secara parsial ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI (H_2 diterima). Semakin tinggi ukuran pemerintah, maka semakin tinggi temuan kelemahan SPI.

Hasil penelitian ini didukung oleh Yaya & Suprobo (2019) dan Iqbal (2017) yang dalam penelitiannya menemukan hubungan antara ukuran pemerintah dengan kelemahan SPI. Ukuran pemerintah daerah merupakan skala pengukuran untuk menggambarkan besar kecilnya suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan total aset yang besar memiliki resiko yang tinggi untuk kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset (Majid et al, 2017) Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa total aset yang besar menjamin pemerintah daerah memiliki kelemahan SPI yang tinggi atau meningkat.

Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien menunjukkan nilai negatif dan signifikan terhadap kelemahan SPI, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,63 > 1,66$). Probabilitas tingkat signifikansi untuk variabel belanja modal daerah sebesar 0,05 sedangkan nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,05 \leq 0,05$). Secara parsial belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPI (H_3 diterima). Semakin tinggi belanja modal, maka semakin turunnya temuan kelemahan SPI.

Hasil penelitian ini didukung oleh Yuni (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan hubungan antara ukuran pemerintah dengan kelemahan SPI. Dalam penelitian ini belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Secara teoritis menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan SPI karena pada sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini seluruh kewenangan keuangan ditangani oleh pemerintah daerah secara penuh, termasuk di dalamnya pengelolaan penerimaan daerah dan belanja modal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengalokasikan ke dalam belanja-belanja sehingga diharapkan pemerintah daerah yang memiliki penerimaan dan belanja modal relatif besar juga memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, agar dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Secara parsial maupun simultan pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan SPI dengan nilai 10,23% dan 89,77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan memperluas wilayah penelitian. Tidak hanya pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tetapi juga menambah periode pengamatan yang lebih panjang. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambahkan variabel independen lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki & Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*.
Andesti, M., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.468>
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas IHPS Semester I Tahun 2022
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017.
----- 2018.
----- 2019.
----- 2020.

----- 2021.

Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2017.

----- 2018.

----- 2019.

----- 2020.

----- 2021.

Fauzi, Fitriya., Dencik, Abdul Basyith., & Asiati, D. I. (2019). *Metode Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Iqbal, Muhammad. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 881-895.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Majid, Abdul., Herwanti, Rr. Titiek., Fitriah, Nur. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Magister Manajemen*, 6 (1), 1-21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Saferi, M., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2234–2249. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.209>.

Samhah, H. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 22, 1–19.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yaya, Rizal., & Suprobo, Halim Sri. (2019). Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government Indonesia. *Jurnal of Accounting and Investment*, 20 (3), 296-309.